

TESIS

**ANALISIS YURIDIS JAMINAN BANK GARANSI DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN
GEDUNG KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR PAKET 2:
Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 60K/Pdt/2020**

Program Studi Magister Kenotariatan



Diajukan Oleh

Fauzan Rizky Adiputra

NIM. 2020123002

Komisi Pembimbing :

**Prof. Dr. Elwi Danil, S.H.,M.H. (Ketua Pembimbing)
Dr. Muhammad Hasbi, S.H.,M.H. (Anggota Pembimbing)**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

**ANALISIS YURIDIS JAMINAN BANK GARANSI DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PERWAKILAN
BANK INDONESIA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR PAKET 2
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 60 K/Pdt/2020)**

(Fauzan Rizky Adiputra, NIM. 2020123002, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Andalas Padang, 2022, 130 halaman)

ABSTRAK

Bank garansi dalam kontrak pekerjaan merupakan suatu jaminan. Adanya bank garansi diawali dengan adanya perjanjian yang mensyaratkan adanya jaminan bank. Guna dari bank garansi adalah apabila penerima pekerjaan tidak menjalankan kewajibannya atau tidak terlambat menjalankan pekerjaan ada jaminan yang dipegang oleh pemberi pekerjaan. Proses pengerjaan yang dilakukan diharapkan berjalan dan selesai pada waktu yang sudah ditentukan namun tidak semua pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Penelitian ini membahas bank garansi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan Pembangunan gedung kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Paket 2 berdasarkan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 60K/Pdt/2020 yang menitikberatkan pada bank garansi nya itu tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap status bank garansi tersebut. Jaminan yang diberikan penerima pekerjaan tersebut bisa dicairkan oleh bank sebagai penjamin apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pekerjaan. Jaminan juga bisa digunakan untuk syarat-syarat mengikuti pekerjaan yang melibatkan nominal yang besar. Jaminan tersebut juga harus memiliki nilai ekonomis yang berada di harga wajar atau diatas harga pembayaran perjanjian antar penerima kerja dan pemberi kerja, sehingga apabila terjadi wanprestasi bisa menutupi biaya kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut. Wanprestasi dalam pekerjaan pemborongan juga bisa terjadi dengan sengaja ataupun ada kondisi tertentu, seperti *force majeure*. *force majeure* selalu merujuk pada kejadian diluar perkiraan dan berdampak seorang pihak tidak bisa memenuhi isi perjanjian. Dalam kasus yang diangkat oleh penulis, wanprestasi yang terjadi dikarenakan ada pihak lain yang lalai dalam menjalankan pekerjaannya yang membuat penerima pekerjaan terlambat menyelesaikan pekerjaannya sehingga pemberi pekerjaan merasa penerima pekerjaan sudah melakukan wanprestasi yaitu terlambat menyelesaikan pekerjaan dan jaminan yang diberikan penerima pekerjaan dapat dicairkan oleh bank, akan tetapi tanpa melakukan pengecekan pihak bank malah mencairkan bank garansi tersebut secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan sehingga membuat pihak penerima pekerjaan mengalami kerugian.

Kata Kunci : Bank Garansi, Jaminan dan Wanprestasi.

**JURIDICAL ANALYSIS WARRANTY OF BANK GUARANTEE IN THE
IMPLEMENTATION OF BANK INDONESIA REPRESENTATIVE OFFICE BUILDING
CONSTRUCTION AGREEMENTS IN EAST NUSA TENGGARA PROVINCE PACKAGE 2
(CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 60K/PDT/2020)**

*(Fauzan Rizky Adiputra, NIM. 2020123002, Notary Masters Study Program, Faculty Of Law,
University Andalas, Padang, 130 pages)*

ABSTRACT

Bank guarantee on the working contract is a warranty. The existence of bank guarantee begins with an agreement that requires a warranty of the bank. Use of the bank guarantee is for the job recipient does not carry out it's obligation or is not late for work, there is a guarantee held by the employer. The work process are expected to run and done by the time that has been agreed but not all work can be running according to the plan. This study is discuss about bank guarantee in the implementation of Bank Indonesia representative office building construction agreements in East Nusa Tenggara Province Package 2 case study of supreme court decision Number 60K/pdt/2020 that focusing on the bank guarantee it's self. The purpose of this study is to know the legal consequences for it's bank guarantee status. The guarantee given by the job recipient can be use by the bank as a guarantor if there is default by the job recipient. The guarantee also can be used for conditions following job that requires big nominals. The guarantee is also need to have economic value that is at fair price or above the payment price of the agreement between the recipient and the employer, so if a default occurs it can cover the loss as a result of the default. Default in the task work system can also occur intentionally or under certain condition, such as force majeure. Force majeure always refers to unexpected event and impacts to one party that unable to fulfill the consent of the agreement. In this case that raised by the author, default that occurred by the other party who was careless in carrying out it's job resulting the employer felt the job recipient was late in completing the job, the guarantee given by the job recipient to release the guarantee by the bank, however the bank release the bank guarantee without checking and without notification resulting the job recipient suffered a big loss.

Key word : Warranty Of Bank, Guarantee and Default